ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2021)

SKRIPSI

Oleh :

Nama: Yasmin Hamidah Ghaniyya

Nomor Mahasiswa: 18312092

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2021)

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Yasmin Hamidah Ghaniyya

Nomor Mahasiswa: 18312092

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2021)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Yasmin Hamidah Ghaniyya

No. Mahasiswa: 18312092

Telah disetujui oleh disahkan oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, 6 Oktober 2023

Dosen Pembimbing,



Reny Lia Riantika S.E., Ak., M.Acc

BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tida terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyarakta, 10 Oktober 2023

Penulis,



(Yasmin Hamidah Ghaniyya)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2021)

Disusun oleh : YASMIN HAMIDAH GHANIYYA

Nomor Mahasiswa : 18312092

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 01 November 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Reny Lia Riantika, SE., M.Accy. .....

Penguji : Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur atas segala rahmat, karunia, serta pengampunan yang selalu Allah SWT limpahkan dan berikan.

Kupersembahkan hasil ini dengan penuh rasa cinta, kasih sayang, dan hormat kepada:

Keluargaku

Terima kasih kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materi serta do`a yang selalu menyertai perjalananku. Terima kasih kepada kedua orang tuaku yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendukungku selama perjalanan menulis skripsi ini. Terima kasih kepada kakak perempuanku tercinta yang selalu mendengarkan segala keluh kesah dan tangisku. Terakhir, aku ucapkan terimakasih kepada kakak dan adik laki-lakiku yang selalu mendukung dan memberikan bantuan dalam pengerjaan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Segala puji Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT pemilik dari segala ilmu pengetahuan dan penguasa alam semesta berserta isinya atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya yang tiada henti dilimpahkan dan diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan pengikutnya. Segala puji syukur penulis ucapkan tiada henti kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2021)"**. Skripsi ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan sarjana strata 1 dan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya atas usaha, bantuan, bimbingan, dan dorongan yang penulis terima, baik secara lagsung maupun tidak langsung, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan FakultasBisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Reny Lia Riantika S.E., Ak., M.Acc selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan senantiasa selalu meberikan arahan, bimbingan, dan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen, staf pegawai, dan karyawan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas segala ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
5. Kedua orang tua tercinta dan tersayang atas dukungan dan kasih sayang yang selalu menyertai perjalanan penulisan skripsi ini.
6. Kakak perempuanku yang selalu mendukung, membimbing, dan mendengarkan segala keluh, kesah, dan tangisku selama penulisan skripsi ini berjalan.
7. Kakak dan adik laki-lakiku yang memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini bisa terselaikan.
8. Keponakan perempuanku, Hannah dan Hafa, atas segala tawa dan kebahagian yang aku terima disela-sela penulisan skripsi ini sehingga bisa menyelesaikannya.
9. Kepada teman-teman *online*ku yang selalu mendukung dan mendengarkan cerita perjalanan skripsiku.

10. Teman-temanku selama menempuh pendidikan di FakultasBisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan.
11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, oleh kaena itu penulis harapkan kritik dan saran dengan sifat membangun dapat disampaikan sehingga skipsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca ataupun pihak yang memperlukannya.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Oktober 2023

Penulis



Yasmin Hamidah Ghaniyya

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul Depan Skripsi i

Halaman Judul Skripsi ii

Halaman Pengesahan Skripsi iii

Halaman Bebas Plagiarisme..... iv

Halaman Berita Acara Ujian Skripsi.....v

Halaman Persembahan vi

Kata Pengantar vii

Daftar Isi x

Daftar Tabel xii

Daftar Gambar..... xiii

Daftar Lampiran xiv

Abstarl.....xv

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang Masalah.....1

1.2. Rumusan Masalah 8

1.3. Tujuan Penelitian.....9

1.4. Manfaat Penelitian.....10

1.5. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA 13
2.1. Landasan Teori 13
2.2. Penelitian Terdahulu 20
2.3. Kerangka Penelitian 23
2.4. Hipotesis Penelitian 24
BAB III METODE PENELITIAN 32
3.1. Populasi dan Sampel 32
3.2. Pengumpulan Data dan Pengambilan Data 33
3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 34
3.4. Metode Analisis Data 37
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 41
4.1. Deskripsi Objek Penelitian 41
4.2. Analisis Data 43
4.3. Pembahasan 51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 60
5.1. Simpulan 60
5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rangkuman Perbandingan Penelitian Sebelumnya.....6

Tabel 4.1 Pemilihan Sampel Berdasarkan Kriteria.....41

Tabel 4.2 Uji Outer Loading (sebelum dihapus).....43

Tabel 4.3 Uji Outer Loading (setelah dihapus).....45

Tabel 4.4 Uji Average Variance Extracted (AVE).....45

Tabel 4.5 Uji Composite Reliability.....46

Tabel 4.6 Uji Fornell-Lackers Criterion.....47

Tabel 4.7 Uji R-Squares (R^2).....47

Tabel 4.8 Uji Pengaruh Langsung.....48

Tabel 4.9 Uji Pengaruh Tidak Langsung.....50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 24

Gambar 4.1 Hasil Uji Outer Model.....44

Gambar 4 2 Hasil Uji Outer Model (setelah dihapus).....44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Jumlah Temuan Audit, Belanja Daerah, dan Ukuran Daerah 68

Lampiran 2 Daftar Sampel Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi dan Rasio Efektivitas 71

Lampiran 3 Hasil Uji Model SEM PLS 3.0 75

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa pada tahun anggaran 2021 dengan tindak lanjut rekomendasi sebagai variabel *intervening* (mediasi). Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian adalah pengaruh temuan audit, belanja daerah, karakteristik pemerintah, dan tindak lanjut rekomendasi.

105 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa yang terdaftar pada website resmi BPK RI www.bpk.go.id tahun 2021 digunakan dalam penelitian ini. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Model analisis yang digunakan dalam penelitian adalah SEM (*Structural Equation Model*) PLS 3.0 dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% (lima persen).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) temuan audit berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi, 2) belanja daerah dan karakteristik pememerintah daerah, ukuran daerah, tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi, 3) belanjan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda, 4) temuan audit, karakteristik pememerintah daerah, ukuran daerah, dan tindak lanjut rekomendasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan 5) temuan audit, belanja daerah, dan karakteristik pememerintah daerah, ukuran daerah, tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui tindak lanjut rekomendasi.

Kata kunci: temuan audit, belanja daerah, karakterisitik pemerintah daerah, tindak lanjut rekomendasi hasil penelitian, dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that affect the financial performance of district/city governments throughout Java in 2021 fiscal year with follow-up recommendations as intervening variables (mediation). The factors analyzed in the study were the influence of audit findings, regional spending, government characteristics, and follow-up recommendations.

This study uses data samples from 105 Financial Statements of District/City Governments throughout Java registered in the official website of BPK RI www.bpk.go.id in 2021. The sampling method used is purposive sampling. The analysis model used in this study is SEM (Structural Equation Model) PLS 3.0 with a significance level of 0.05 or 5% (five percent).

The results of this study are as following: 1) audit findings had an effect on the follow-up recommendations, 2) regional expenditures and characteristics of regional governments, regional size, had no effect on the follow-up recommendations, 3) regional expenditures had an effect on local government financial performance, 4) audit findings, characteristics of local governments, regional size, and follow-up recommendations had no effect on the financial performance of local governments, and 5) audit findings, regional expenditures, and characteristics of regional governments, regional size, had no effect on the financial performance of local governments through follow-up recommendations.

Keywords: audit findings, regional expenditures, characteristics of local governments, follow-up recommendations of research results, and financial performance of local governments.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan penyerahan (desentralisasi) dan pelimpahan (dekonsentrasi) urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan setelah jatuhnya era orde baru pada tahun 1998 dan naiknya era reformasi. Desentralisasi atau penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom adalah dengan tujuan agar pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan atas pengelolaan serta pengaturan daerahnya berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai: “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Landasan hukum dikeluarkannya pedoman pelaksanaan otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah TAP MPR Nomor XV/MPR/1998.

Otonomi daerah menjadi tuntutan tersendiri bagi setiap daerah untuk melaksanakan kemandirian atas daerahnya masing-masing. Dalam pengelolaan

keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*). Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan bahwa "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan." Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik sehingga dapat tercapainya penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah dan untuk meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah daerah juga dituntut untuk menyajikan laporan keuangan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah atas manfaat hak yang digunakan dan diperoleh daerah, dilakukan evaluasi pengukuran kinerja. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 mengenai evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan tujuan untuk menilai serta meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk tolak ukur (indikator) untuk melakukaan pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah. Selain itu terdapat 3 (tiga) maksud dalam melakukan pengukuran kinerja sektor publik yaitu untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi lembaga (Mardiasmo, 2018: 151-152). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, wujud pertanggungjawaban APBN/APBD masing-masing entitas

pelaporan dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan ini diharapkan pemerintah daerah di Indonesia mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian dan pembiayaan daerahnya atas pengelolaan sumber daya daerah yang dimiliki dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (10), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan berupa audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menguji kelayakan dari laporan keuangan tersebut (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terdiri atas pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan atas kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). BPK mendefinisikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan tertulis dari poses pemeriksaan yang berisi analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksaan pemeriksaan. Terdapat 3 (tiga) jenis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan BPK kepada pemerintah.

Hendriyani & Tahar (2015) menjelaskan temuan audit sebagai temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kasus-kasus pada laporan keuangan berupa ketidaksesuaian dan kerancuan dengan realisasi laporan serta teridentifikasi sebagai suatu pelanggaran. Perbaikan terhadap temuan pemeriksaan yang tertulis di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi dan ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk

melakukan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, terdapat 4 (empat) status tindak lanjut yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Dalam tabel rencana aksi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada LHP atas hasil pemeriksaan terhadap LKPD, terdapat 3 temuan pemeriksaan yaitu temuan temuan atas aset, pendapatan dan belanja. Menurut PSAP No.2 Paragfraf 7, definisi belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun salah satu klasifikasi belanja daerah merupakan belanja modal yang meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Selain temuan audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan belanja daerah, karakteristik pemerintah daerah mampu mempengaruhi kinerja suatu pemerintah daerah. Hatimah (2018) dalam penelitiannya menjelaskan definisi karakteristik pemerintah daerah sebagai ciri-ciri khusus yang melekat, menandai, dan membedakan pemerintah daerah dengan pemerintah derah lainnya. Terdapat 3 karakteristik pemerintah daerah yaitu: 1) ukuran (*size*) pemerintah daerah yang

diukur berdasarkan jumlah total aset, 2) tingkat kekayaan (*wealth*) daerah yang dilihat berdasarkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan 3) tingkat ketergantungan daerah pada pusat yang dapat dilihat berdasarkan jumlah penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU).

Jumlah temuan audit BPK terhadap LKPD Kabupaten/Kota Jawa Barat tahun 2021 meningkat sebesar 0.14904 atau 14.9% dibandingkan dengan tahun 2020. Begitu pula dengan jumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD Kabupaten/Kota Jawa Barat tahun 2021 ikut meningkat sebesar 0.09 atau 9% dibandingkan denga tahun 2020.

Selain jumlah temuan audit dan rekomendasi yang diberikan BPK pada LKPD Kabupaten/Kota Jawa Barat meningkat, jumlah temuan audit BPK terhadap LKPD Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2021 meningkat sebesar 0.0712 atau 7.1% dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPK atas temuan audit LKPD Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2021 pun juga meningkat sebanyak 0.0959 atau 10% dibandingkan dengan tahun 2020.

Selain Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Barat dan Jawa Tengah yang mengalami peningkatan pada temuan audit dan jumlah rekomendasi BPK atas LKPD tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur juga mengalami peningkatan atas jumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebesar 0.0828 atau 8.3% dibandingkan dengan tahun 2020.

Dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur, jumlah total

aset yang tercantum pada LKPD Kabupaten/Kota DIY tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0.1834 atau 18% dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 1.1 Rangkuman Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No	Variabel	Peneliti	Hasil
1.	Temuan Audit	Hakim & Nurhenti (2020)	Berpengaruh negatif signifikan
		Hatimah (2018)	Tidak berpengaruh secara signifikan
2.	Belanja Daerah	Sari & Halmawati (2021)	Berpengaruh positif dan signifikan
		Defitri et al. (2021)	Tidak berpengaruh secara signifikan
3.	Karakteristik Pemerintah Daerah	Simartama (2019)	Berpengaruh signifikan secara parsial
		Hakim & Nurhenti (2020)	Tidak berpengaruh signifikan secara parsial
4.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penelitian	Kurnia (2020)	Berpengaruh secara signifikan
		Tjandrakirana et al. (2019)	Tidak berpengaruh signifikan secara parsial

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, hasil penelitian mengenai pengaruh temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh Hakim & Nurhenti (2020) adalah berpengaruh negatif signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian Hatimah (2018) menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari & Halmawati (2021) mengenai belanja daerah adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitia yang dilakukan oleh Defitri et al. (2021) menunjukkan hasil bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Simarmata (2019) mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah, ukuran daerah (*size*) dan tingkat kekayaan daerah (*wealth*), terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah berpengaruh signifikan secara parsial. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hakim & Nurhenti (2020) mengenai karakteristik pemerintah, ukuran daerah (*size*) dan tingkat kekayaan daerah (*wealth*), terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurnia (2020) mengenai pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) terhadap kinerja pemerintah daerah adalah berpengaruh secara signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian Tjandrakirana et al. (2019) yang menunjukkan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) tidak berpengaruh secara signifikan terhap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Beberapa perbedaan penelitian yang penulis lakukan pada penelitian yaitu: pertama, berbeda dengan penelitian oleh Tjandrakirana et al. (2019) yang menggunakan teori keagenan, pada penelitian ini penulis menggunakan teori *stewardship*. Kedua, pemilihan karakteristik pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian adalah ukuran daerah (*size*) yang diukur dengan jumlah total aset didasari oleh hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap LKPD se-Jawa tahun anggaran 2021 yang tercantum pada LHP IHPS I 2022. Ketiga, berbeda dengan peneltian Satria & Sari (2018) yang menggunakan rasio indikator kinerja efektivitas dan efisiensi dalam penelitian ini hanya menggunakan rasio indikator kinerja efektivitas.

Sesuai dengan penjabaran di atas, penulis bertujuan untuk melanjutkan penelitian dengan melakukan pertimbangan berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan judul **"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Sebagai Variabel Intervening** (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2021)**".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas masalah diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan?
2. Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan?
3. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan?
4. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
7. Apakah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

8. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui mediasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan?
9. Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui mediasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan?
10. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh temuan audit terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemeritah daerah terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemeritah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
7. Untuk mengetahui pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

8. Untuk mengetahui pengaruh temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui mediasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
9. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemeritah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui mediasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
10. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan peneliti mengenai temuan audit, karakteristik pemerintah daerah, belanja daerah dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap kinerja Pemerintah Daerah se-Jawa 2021.
2. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai tinjauan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang kajian sektor publik ataupun pada bidang lain yang masih berkaitan.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum untuk mengetahui seberapa baik kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Jawa tahun anggaran 2020 berdasarkan

temuan audit BPK, karakteristik pemeritah daerah, belanja daerah dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

1.5. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan serta menjelaskan latar belakang penelitian, alasan dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, masnfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan dan menjelaskan secara rinci mengenai landasan teori yang digunakan, definisi variabel yang digunakan, tinjauan peneliti-peneliti terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan secara rinci tentang metode yang berhubungan dengan data penelitian. Seperti populasi, sampel, pengambilan data, pengumpulan data, dan definisi serta pengukuran variabel yang digunakan. Bab ini juga menguraikan secara rinci mengenai metode yang berhubungan dengan analisis data, yaitu alat yang digunakan untuk melakukan analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisikan analisis deskripsi objek penelitian yang dibahas, interpretasi hasil pengujian data yang telah diperoleh, dan pengujian hipotesis yang telah dibuat.

BAB V Simpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan terhadap analisis hasil pengujian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang dapat dipergunakan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menjelaskan hubungan dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai pihak penerima amanah atau *steward* terhadap pihak pemberi amanah atau *principal* yaitu masyarakat. Raharjo (2007) menjelaskan pengertian teori *stewardship* sebagai berikut:

> "Teori steward menggambarkan situasi dimana para manajer (*steward*) tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang tetapi lebih ditunjukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi."

Berdasarkan asumsi filosofis, teori stewardship merupakan suatu teori yang dibangun berdasarkan sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Teori *stewardship* juga memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang, dimana para penerima amanah (*steward*) termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemberi amanah (*principal*), selain itu perilaku *steward* yang tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* akan selalu berusaha mencapai sasaran organisasinya (Rahmayanti, 2018).

Stewardship merupakan suatu pandangan baru tentang pengelolaan orgnasisasi dimana orang bekerja tidak hanya untuk memaksimalkan utilitas pribadinya, tetapi mereka lebih bertanggung jawab secara bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi (Saffanah, 2022). Pemerintah daerah,

untuk mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejateraan rakyat dan sebagai pihak penerima amanah serta bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan pihak pemberi amanah atau mansyarakat, memiliki kewajiban untuk terus mewujudkan akuntabilitas dan transparasi atas kinerja keuangan. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan bahwa "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan." Menurut PSAK No. 1 tujuan laporan keuangan secara umum adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini adalah dapat menjelaskan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dengan bertindak untuk kepentingan publik yaitu meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik secaa maksimal dengan pertanggungjawaban atas keuangan dan sumber daya yang diamanahkan melaksanakan serta selalu menjalankan tugas dan fungsinya degan tepat.

2.1.2. Temuan Audit

Audit merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengatahui bagaimana sesungguh pelaksanaan ditetapkan. Menurut (Rai, 2008:179) pengertian temuan audit adalah sebagai berikut:

> "Temuan audit merupakan temuan masalah-masalah penting (material) selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap pebaikan dan peningkatan kinerja (ekonomi, efisiensi, dan efektivats) entitas yang diaudit."

Lembaga negara independen yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah di Indonesia adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Tujuan audit (pemeriksaan) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) adalah untuk melakukan pengujian dan mendeteksi salah saji material yang terdapat didalam laporan keuangan, dan apabila ditemukan penyimpangan selama BPK berkewajiban untuk melakukan pengungkapan yang disebut sebagai temuan audit.

2.1.3. Belanja Daerah

Belanja daerah atau pengeluaran pemerintah dalam APBD merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menjelaskan: "Belanja daerah adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian." Tujuan dipergunakannya belanja daerah adalah dalam rangka mendanai pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan

bersama (Saputri & Kurnia, 2020). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikasi belanja daerah sebagai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

2.1.3.1. Belanja Modal

PSAP No.2 Paragraf 7 mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dengan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk kegiatan pemerintahan. Salah satu prasyarat untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah daerah adalah dengan dilakukannya belanja modal untuk meningkatkan jumlah aset tetap, hal ini didasarkan pada kebutuhan daerah atas sarana dan prasarana yang lancar dan memadai (Tarihoran, 2019).

2.1.4. Karakteristik Pemerintah Daerah

2.1.4.1. Ukuran Daerah (*Size*)

Ukuran daerah merupakan nilai untuk mengukur besar kecilnya suatu pemerintahan daerah. Dalam konteks akuntansi sektor publik total aset dapat digunakan untuk menggambarkan ukuran suatu daerah, hal ini dikarenakan total aset memiliki nilai yang lebih stabil jika dibandingkan dengan penjualan atau kapitalisasi pasar (Rahmayanti, 2018). Dengan jumlah aset pemerintah yang besar akan memudahkan kegiatan operasional dan meningkatkan serta

mempermudah dalam memberi pelayanan yang memadai bagi masyarakat. Selain itu, kemudahan pada bidang operasional akan memperlancar perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan menjadi salah satu bukti peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar, dalam hal ini adalah jumlah aset, akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar karena memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula. Kompleksitas dalam pengelolaan keuangan akan semakin meningkat karena semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan (Simartama, 2019).

2.1.4.2. Tingkat kekayaan Daerah (*Wealth*)

Tingkat kekayaan suatu daerah dapat diukur berdasarkan dengan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai sumber penerimaan asli daerah, PAD digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam menjalankan aktivias pemeritahan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan membiayai pembangunan infrastruktur daerah serta usaha-usaha daerah (Hatimah, 2018).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menjelaskan: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi."

Kinerja pemerintah daerah dianggap baik ketika pemerintah daerah mampu untuk meningkatkan potensi kemandirian daerah dengan meningkatkan jumlah serta kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ayunisa, 2022). Salah satu contoh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik itu jumlah maupun kontribusi, dapat dilihat melalui seberapa baik infrastruktur daerah tersebut.

2.1.4.3. Tingkat Ketergantungan Daerah Pada Pusat

Tingkat ketergantungan daerah pada pusat dapat diukur berdasarkan dengan besarnya jumlah Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menjelaskan: "Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi."

Dana Alokasi Umum (DAU) dan penerimaan umum lainnya pada anggaran APBD dalam penggunaannya harus tetap sesuai dengan kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin

baik (Hatimah, 2018). Semakin tinggi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah pusat mengharapkan meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang ditandai dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Rekomendasi sendiri merupakan saran yang diberikan pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Tindak lanjut atas rekomendasi sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Tentang Pemantauan Pelaksanaan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai jawaban atau penjelasan atas pelaksaan tindak lanjut dilampiri dengan dokumen bukti pendukung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi yang ada pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Diharapkan dengan adanya rekomendasi BPK dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan (Purba, 2017).

2.1.6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 medefinisikan keuangan daerah sebagai: “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta

segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut." Achmad et al. (2017) menyebutkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan 4 (empat) rasio, yaitu:

1. Kemandirian, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaran pemerintahannya sendiri dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh.
2. Efektivitas, menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target pendapatan daerah yang dapat dicapai berdasarkan potensi riil daerah.
3. Efisiensi, menggambarkan perbandingan antara sebarapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai realisasi pendapatan dengan realiasasi pendapatan yang diterima
4. Ekonomi, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meminimalisir pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hatimah (2018) yang membahas "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah abupaten Luwu" dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hanya variabel tingkat kekayaan daerah berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan variabel ukuran

daerah, tingkat ketergantungan pada pusat dan temuan audit tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hakim & Nurhenti (2020) yang membahas "*Determinants of the Performance of Provincial Governments in Indonesia*" menunjukkan bahwa variabel ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, populasi, dan opini audit BPK tidak berpengaruh signifikan, sedangkan variabel temuan audit BPK berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Halmawati (2021) yang membahas tentang "Pengaruh PendapatanAsli Daerah, DanaAlokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat" menunjukkan bahwa variabel PAD, belanja daerah, dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Peneltian Saputri & Kurnia (2020) yang membahas "Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah" menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian oleh Simarmata (2019) yang membahas tentang "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Utara" menunjukkan secara parsial variabel ukuran daerah dan tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan

terhadap kinerja Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara, sedangkan temuan audit dan tingkat ketergantungan daerah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Secara simultan variabel ukuran daerah, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan daerah, dan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian Kurnia (2020) yang membahas tentang "Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah" menunjukkan bahwa variabel temuan audit, opini audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan struktur anggaran berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Secara parsial variabel temuan audit dan struktur anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, variabel opini audit berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, dan variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh dengan arah negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

Terakhir, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Tjandrakirana et al. (2019) yang membahas "Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Ketidakpatuhan Pada Peraturan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan Tindak Lanjut Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara" dan menunjukkan bahwa variabel opini audit, ketidakpatuhan pada peraturan,

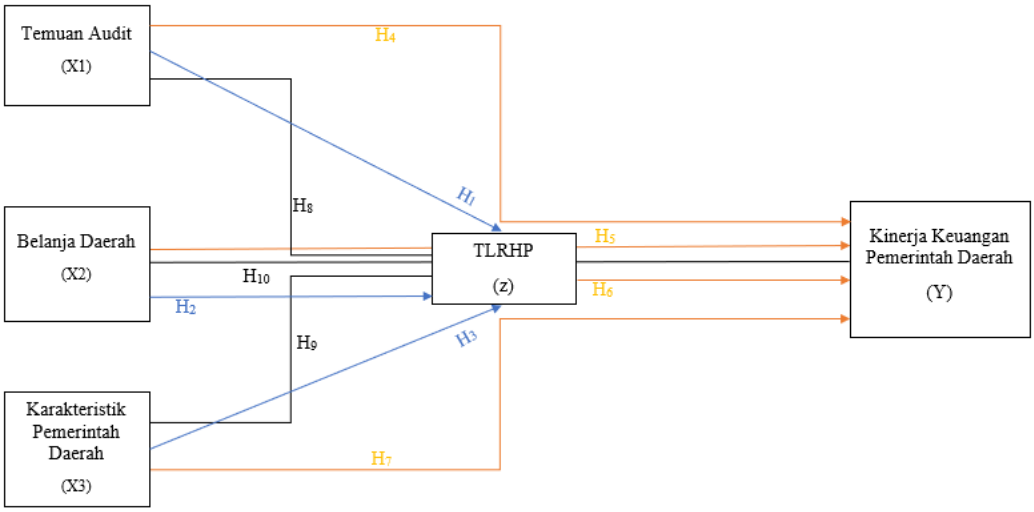
kelemahan sistem pengendalian intern, dan tindak lanjut rekomendasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.3. Kerangka Penelitian

Berdasarkan latas belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditentuka variabel-variable yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan pada penelitian adalah temuan audit, belanja daerah, dan karakteristik pemerintah daerah.
2. Variabel mediasi yang digunakan pada penelitian adalah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
3. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hubungan teoritis antara variabel-variabel di atas, yaitu hubungan antara variabel temuan audit, belanja daerah, dan karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut pada Gambar 2.1 :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis Penelitian

2.2.1. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi

Kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan pada laporan keuangan akan berpengaruh terhadap seberapa baik kinerja pemerintah daerah. hal ini dapat dilihat melalui jumlah tindak lanjut rekomendasi BPK yang diterima. Tindak lanjut rekomendasi juga merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja keuangan yang dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyetorkan kembali uang/aset ke pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_1: Temuan audit berpengaruh positif terhadap tindak lanjut rekomendasi

2.2.2. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi

Dengan dilakukannya kegiatan belanja daerah dan modal untuk meningkatkan infrastruktur daerah dan pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan fasilitas sosial/umum) mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun, semakin tinggi jumlah realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya akan menimbulkan kecurigaan terjadinya kecuranga. Hal ini akan meningkatkan jumlah temuan, baik pengendalian intern maupun kepatuhan peundangan, dan akan meningkatkan jumlah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_2: Belanja daerah berpengaruh poisitf terhadap tindak lanjut rekomendasi

2.2.3. Pengaruh Karakteristis Pemerintah Daerah Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi

Aset adalah sumber daya yang dimiliki entitas untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Semakin besar aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menimbulkan kesulitan terhadap tata kelola, pengawasan, dan pertanggungjawabannya. Tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit

terhadap aset terjadi akibat kurangnya pengawasan pemerintah daerah pada pengelolaan aset yang dimiliki.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_3: Karakteristik pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tindak lanjut rekomendasi

2.2.4. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan audit sebagai temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kasus-kasus pada laporan keuangan berupa ketidaksesuaian dan kerancuan dengan realisasi laporan serta teridentifikasi sebagai suatu pelanggaran. Semakin tinggi angka pada temuan audit akan mempengaruhi seberapa baik kinerja pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, ini dapat dilihat melalui seberapa banyak jumlah tindak lanjut rekomendasi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pelanggaran oleh pemerintah daerah terhadap ketentuan-ketentuan mengenai pengendalian intern dan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim & Nurhenti (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Simartama (2019) menunjukkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_4: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.4.5. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal dalam bentuk aset tatap berwujud merupakan salah satu bentuk belanja modal guna pemenuhan standar minimal pelayanan dan meningkatkan pelayanan dasar terhadap masyarakat. Semakin tinggi belanja modal pemerintah daerah, maka semakin baik dan berkualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Rosadi & Okfitasari, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Halmawati (2021) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan peneltian Saputri & Kurnia (2020) yang menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_5: Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

2.4.6. Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Terhadap Kinerja Keuangan

Setiap temuan atas pemeriksaan dapat menghasilkan 1 (satu) atau lebih rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi merupakan saran yang relevan dari pemeriksa berdasarkan temuan pemeriksaannya yang diberikan dan ditujukan kepada entitas yang berwenang untuk melakukan tindakan

perbaikan. Pengaruh tindak lanjut atas rekomendasi dapat meminimalisir atau mengurangi akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan atas pengelolaan dan tanggungjawab atas keuangan. Tindak lanjut sendiri berkaitan penting dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah, selain itu tindak lanjut dilakukan juga untuk mengurangi temuan-temuan hasil pemeriksaan yang terjadi secara berulang (Tjandrakirana et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan Kurnia (2020) menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh dengan arah negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_6: Tindak lanjut rekomendasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

2.4.7. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat merupakan tujuan utama program kerja pemerintah daerah. Baik atau tidaknya kinerja pemerintah daerah dapat dilihat melalui seberapa baik kualitas pelayanan publik (fasilitas kesehatan, pendidikan, dll) yang diberikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan sumber daya dan fasilitas aset yang dimiliki merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatkan layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Semakin banyak aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka akan semakin baik infrastruktur (jalan, jembatan, dll) yang dimiliki.

Simarmata (2019) menunjukkan dalam penilitiannya bahwa variabel karakteristik pemerintah daerah, ukuran daerah, berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Hakim & Nurhenti (2020) yang menunjukkan bahwa variabel karakteristik pemerintah daerah, ukuran daerah, berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_7: Karakteristik pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

2.4.8. Pengaruh Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Tindak Lanjut Rekomendasi Sebagai Variabel Mediasi (*Intervening*)

Berdasarkan temuan pada proses audit baik/tidaknya kinerja pemerintah daerah dapat ditentukan. Hal ini ditunjukkan berdasarkan dengan jumlah tindak lanjut yang dilakukan dengan sesuai oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi BPK terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat temuan audit, berupa ketidaksesuaian dan kerancuan dengan realisasi laporan serta teridentifikasi sebagai suatu pelanggaran pada pemeriksaan. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) juga diperlukan untuk periode selanjutnya untuk menghindari kesalahan yang berulang dan perbaikan pengelolaan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_8: Temuan audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui tindak lanjut rekomendasi

2.4.9. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Tindak Lanjut Rekomendasi Sebagai Variabel Mediasi (*Intervening*)

Pengaruh tindak lanjut atas rekomendasi dapat meminimalisir atau mengurangi akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggungjawab atas keuangan, serta berkaitan dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Bentuk dari tindak lanjut yang selalu dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tindak lanjut terhadap belanja daerah. Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja daerah berdasarkan kelompok jenisnya. Dengan dilakukannya kegiatan belanja modal yang diasumsikan akan membawa *multiplier effect* bagi perekonomian masyarakat dengan cara meningkatkan infrastruktur daerah mampu meingkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Andani et al., 2019). Kinerja pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh seberapa besar belanja modal di pemerintahan dilakuka, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya infrastruktur daerah maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_9: Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui tindak lanjut rekomendasi

2.4.10. Pengaruh Karakteristis Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Tindak Lanjut Rekomendasi Sebagai Variabel Mediasi (Intervening)

Pentingnya menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didukung dengan peningkatan jumlah aset dan layanan publik merupakan salah satu contohnya. Peningkatan jumlah aset daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki sumber pendapatan yang besar.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_{10}: Karakteristik pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui tindak lanjut rekomendasi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa tahun 2021 merupakan populasi yang digunakan pada penelitian ini. Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel penelitian harus memenuhi kriteria berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan tujuan peneltitian. Kriteria sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Pemerintah kabupaten/Kota Se-Jawa yang menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2021 tepat waktu dan telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Se-Jawa yang memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca tahun anggaran 2021 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
3. Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa yang mencantumkan jumlah temuan audit BPK RI dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021, dan
4. Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa yang telah melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK RI dan tercantum pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021.

3.2. Pengumpulan Data dan Pengambilan Data

Sumber data yang digunakan pada adalah jenis data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung tetapi melalui media perantara (Muflihatin, 2016). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-jawa tahun anggaran 2021. Data penelitian diperoleh melalui media perantara pada penelitian ini adalah website resmi BPK RI.

Temuan audit oleh BPK diperoleh melalui dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I 2022 yang memuat laporan keuangan Tahun 2021 yang telah diaudit. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK terhadap Pemerintah Daerah diperoleh melalui dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) tahun 2021. Karakteristik pemerintah daerah ukuran pemerintah (*size*) diperoleh melalui Neraca yang ada pada LKPD yang telah diaudit. Kinerja keuangan pemerintah daerah, dan belanja daerah diperoleh melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ada pada LKPD yang telah diaudit.

Metode pengumpulan data adalah menggunakan studi dokumentasi yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan melakukan pengolahan data yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud daam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-jawa tahun anggaran 2021. Seluruh dokumen yang digunakan sebagai data pada penelitian diambil melalui website resmi BPK RI yaitu www.bpk.go.id.

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel yang digunkan dalam penelitian ini terdiri dari temuan audit oleh BPK, belanja daerah, karakteristik pemerintah daerah, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

3.3.1. variabel Manifest

Variabel manifes atau pada SEM (*Structural Equation Model*) PLS disebut juga *observed variable*, *measured variable*, indikator, atau disebut juga sebagai proksi merupakan variabel yang digunakan untuk menjelaskan atau mengukur variabel laten.

3.3.2. Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen (bebas) disebut juga sebagai variabel laten eksogen pada SEM (*Structural Equation Model*) PLS merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini ada 3 (tiga), yaitu temuan audit, belanja daerah, dan TLRHP.

Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Temuan Audit

   Temuan audit merupakan temuan kasus-kasus berdasarkan LKPD atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari hasil pemeriksaan BPK (Novianti & Kiswanto, 2016). Variabel temuan audit yang

digunakan dalam penelitian diukur dengan jumlah temuan terhadap pengendalian intern dan ketidakpatuhan pemerintah daerah pada ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa.

2. Belanja daerah

Belanja daerah berperan untuk mmpertukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta (Saputri & Kurnia, 2020). Belanja modal merupakan salah satu bentuk dari belanja daerah, dimana pengeluaran anggarannya digunakan untuk perolehan aset tetap serta aset lainnya guna memberi manfaat lebih dari satu periode atau 12 bulan. Variabel belanja daerah yang digunakan dalam penelitian diukur dengan menggunakan perbandingan belanja modal dengan total realisasi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran.

$$\text{Belanja Daerah} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}}$$

3. Karakteristik Pemerintah Daerah (*size*)

Ukuran daerah yang didasarkan pada jumlah aset yang dimiliki perlu melakukan pengungkapan secara lebih lanjut mengenai daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan atas aset, serta pengelolaan atas aset tersebut. Ukuran (*size*) dapat dinyatakan dengan jumlah total aktiva, hal ini dikarenakan nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar dalam melakukan pengukuran aset. Semakin besar ukuran daerah atau bisa disebut juga semakin banyak aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, semakin

besar tekanan untuk melaporkan serta menyajikan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat. Variabel ukuran daerah (*size*) yang digunakan dalam penelitian diukur dengan menggunakan jumlah total aset pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bagian Neraca.

Ukuran (*size*) Daerah = Logaritma natural (Ln) Total Aset (dalam Rp. miliar)

3.3.3. Variabel *Intervening* (Mediasi)

Variabel *intervening* merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel bebas dan terikat menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak diamati dan diukur (Sugiyono, 2019: 39). Variabel mediasi pada penelitian ini adalah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

Rekomendasi BPK bertujuan untuk memperbaiki kelemahan/kekurangan yang ditemukan selama proses audit. Rekomendasi BPK ditujukan kepada orang atau badan yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut perbaikan (Salsabila & Wahyudi, 2022). Variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) penelitian ini diukur dengan cara yang sama sepeti penelitian terdahulu oleh Rahmi & Ariani (2021):

TLRHP: Jumlah Rekomendasi BPK – Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi

3.3.4. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen (terikat) atau disebut juga sebagai variabel laten endogen pada SEM (*Structural Equation Model*) PLS merupakan variabel-

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya pengaruh variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Bastian (2010) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Variabel kinerja pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja rasio kemandirian dan efektivitas. Dalam penelitian ini variabel kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan rasio kemandirian dan rasio efektivitas sesuai dengan pengukuran yang digunakan oleh Puspita & Pangastuti (2022) yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Transfer Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

3.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menginterpretasi data sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai masalah yang dihadapi. Pada penelitian ini pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) digunakan untuk melakukan analisis data dengan bantuan aplikasi *computer* program *Partial Least Square* (PLS). Hair et al. (2022: 30) mendefinisikan *Partial Least Square Structural Equation Model* sebagai: "*A variance based method to estimate structural equation models. The goal is to maximize the explained variance of the endogenous latent variables*".

Analisis pada SEM-PLS terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu model pengukuran atau *outer model* dan model struktural atau *inner model*.

3.4.1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Ghozali & Latan (2015: 7) mengatakan: "Model pengukuran atau *outer model* menunjukan bagaimana variabel manifes atau *observed variable* merepresentasikan variabel laten untuk diukur." Pada model pengukuran atau *outer model*, menurut Hair et al. (2022: 17) rangkaian uji yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

3.4.1.1. Validitas Konvergen

Validitas konvergen dilakukan untuk mengukur validitas dari korelasi antara variabel laten dengan indikatornya (Soeratmoko, 2018). Validitas konvergen dapat diperoleh melalui metode *outer loading* dan *Average Variance Extracted* (AVE). Hair et al. (2022: 20&103) mendefinisikan *outer loading* sebagai: "*outer loadings are the result of single regression of each indicator variable on their corresponding construct. Loadings are of primary interest in the evaluation of reflective measurements models*." dan *Average Variance Extracted* (AVE) sebagai: *"The grand mean value of the squared loadings of the indicators associated with the construct (i.e., the sum of the squared loadings divided by the number of indicators)*."

Dinyatakan memenuhi persyaratan valid jika nilai *loading factor* atau *outer loading* >0,70 dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) >0.50.

3.4.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan indikator dalam mengukur variabel laten. Uji reliabilitas dapat diperoleh melalui metode *composite reliability*. Hair et al. (2022: 103) mendefinisikan *composite reliability* sebagai: *"a measure of internal consistency reliability, which does not assume equal indicator loadings*". Dinyatakan memenuhi persyaratan reliabel jika masing-masing nilai *composite reliability* > 0.70.

3.4.1.3. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan dilakukan untuk mengetahui bahwa korelasi antara variabel dengan variabel laten itu sendiri memiliki diskriminan (perbedaan) dengan variabel laten lainnya. Hair et al. (2022: 104-105) mendefinisikan validitas diskriminan sebagai:

"*The extent to which a construct is truly distinct from other constructs by empirical standards. Thus, establishing discriminant validity implies that a construct is unique and captures phenomena not represented by other constructs in the model*."

Validitas diskriminan dapat diperoleh melalui metode *Fornell-Lackers Criterion*, dimanan nilai korelasi antara variabel dengan variabel laten tersebut harus lebih besar dibandingkan dengan nilai dengan variabel laten lainnya untuk dikatakan valid.

3.4.2. Model Struktural (*Inner Model*)

Ghozali & Latan (2015: 7) mengatakan: "Model struktural menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk". Pada model struktural atau *inner model* pengujian yang dilakukan adalah R-Squares (R^2). R-Squares (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa besar

variabel laten endogen (dependen) yang dapat dijelaskan oleh variabel laten eksogen (independen).

3.4.3. Uji Hipotesis

Pada penelitian ini dilakukan 2 (dua) jenis uji hipotesis, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Uji hipotesis pengaruh langsung dilakukan untuk melihat melihat arah hubungan dan signifikansi (*two tailed*) variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen dengan menggunakan metode *bootstrapping path coefficients*. Uji hipotesis tidak langsung dilakukan untuk melihat melihat arah hubungan dan signifikansi variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen dengan perantara variabel mediasi dengan menggunakan *bootstrapping specific indirect effects*. Hasil uji hipotesis didapatkan dengan melihat nilai signifikansi *p-value* 0.05, dimana apabila nilai sig. < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sebaliknya apabila nilai sig. > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dikaji pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa yang telah melaporkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 dan telah diaudit oleh BPK yang berjumlah 113 pemerintah daerah. Teknik pemilihan sampel pada pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian adalah *purposive sampling*, hal ini dilakukan sehingga sampel-sampel yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel penelitian, dari 113 Pemerintah Daerah Se-Jawa terdapat beberapa pemerintah daerah yang tidak memenuhi kriteria. Pemilihan sampel penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Pemilihan Sampel Penelitian Berdasarkan Kriteria

No.	Kriteria	Tidak Memenuhi Kriteria	Akumulasi
1.	Pemerintah kabupaten/Kota Se-Jawa yang menyajikan laporan keuangan tahun -		

Tabel 4.2

(Lanjutan)

No.	Kriteria	Tidak Memenuhi Kriteria	Akumulasi
	anggaran 2021 tepat waktu dan telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).		113
2.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Se-Jawa yang memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca tahun anggaran 2021 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).		113
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa yang mencantumkan jumlah temuan audit dan telah melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK RI dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021.	(8)	
	Jumlah Sampel Selama Periode Penelitian (1 tahun)		105

4.2. Analisis Data

Sampel pada penelitian berjumlah 113 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa untuk periode 1 (satu) tahun. Setelah disesuaikan berdasarkan dengan kriteria pada tabel 4.1, terdapat 105 data yang akan digunakan yang telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

4.2.1. Model Pengukuran

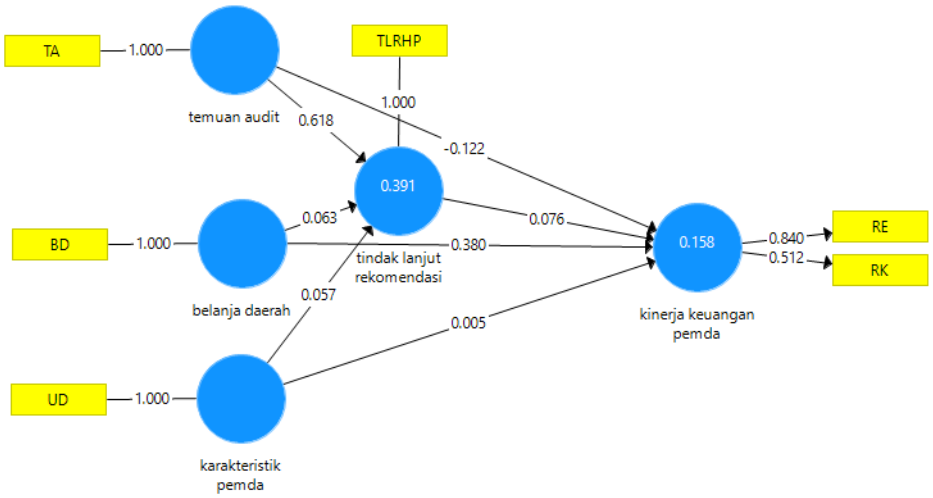
4.2.3.1. Validitas Konvergen

Validitas konvergen dilakukan untuk mengukur validitas dari korelasi antara variabel laten dengan indikatornya (Soeratmoko, 2018). Validitas konvergen dapat diperoleh melalui metode *loading factor* atau *outer loading* dengan nilai > 0,70 dan *Average Variance Extracted* (AVE) dengan nilai > 0.50. Berikut adalah hasil uji *outer loading* dan *Average Variance Extracted* (AVE) pada tabel 4.2 dan 4.4:

Tabel 4.3 Uji *Outer Loading*

	belanja daerah	karakteristik pemda	kinerja keuangan pemda	temuan audit	tindak lanjut rekomendasi
Belanja Daerah	1.000				
Rasio Eefektivitas			0.840		
Rasio Kemandirian			0.512		
Temuan Audit				1.000	
Tindak Lanjut Rekomendasi					1.000
Ukuran Daerah		1.000			

Sumber: Output PLS 3.0, data diolah peneliti, 2023

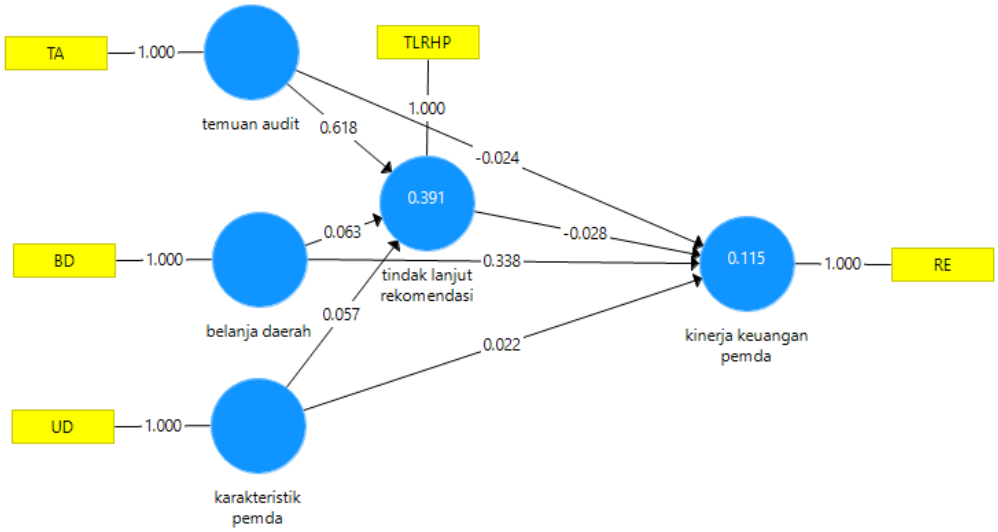


Gambar 4.1 Hasil Uji Outer Model

Sumber: Output PLS 3.0, data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hanya indikator rasio kemandirian memiliki nilai *outer loading* < 0,70 sehingga perlu dihapuskan dan dilakukannya pengujian ulang.

Gambar 4 2 Hasil Uji *Outer Model* (setelah dihapus)



Sumber: Output PLS 3.0, data diolah peneliti, 2023

Tabel 4.4 Uji *Outer Loading*

	belanja daerah	karakteristik pemda	kinerja keuangan pemda	temuan audit	tindak lanjut rekomendasi
Belanja Daerah	1.000				
Rasio Eefektivitas			1.000		
Temuan Audit				1.000	
Tindak Lanjut Rekomendasi					1.000
Ukuran Daerah		1.000			

Sumber: Output PLS 3.0, data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.3 setelah dilakukannya penghapusan indikator variabel kinerja keuangan pemerintah daerah, rasio kemandirian, diketahui bahwa seluruh indikator variabel telah valid dan memenuhi kriteria valid karena memiliki nilai *outer loading* > 0.70.

Tabel 4.5 Uji *Average Variance Extracted* (AVE)

	AVE
Belanja Daerah	1.000
Rasio Eefektivitas	1.000
Temuan Audit	1.000
Tindak Lanjut Rekomendasi	1.000
Ukuran Daerah	1.000

Sumber: Output PLS 3.0, data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.4 diketahui nilai AVE > 0.50 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing konstruk atau variabel laten temuan audit, belanja daerah, karakteristik pemerintah daerah, tindak lanjut rekomendasi, dan kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai validitas yang baik dan telah memenuhi kriteria valid pengujian.

4.2.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan indikator dalam mengukur variabel laten melalui metode *composite reliability*. Dinyatakan memenuhi persyaratan reliabel jika masing-masing nilai *composite reliability* > 0.70. Berikut adalah hasil uji *composite reliability* pada tabel 4.5:

Tabel 4.6 Uji *Composite Reliability*

	Composite Reliability
Belanja Daerah	1.000
Rasio Eefektivitas	1.000
Temuan Audit	1.000
Tindak Lanjut Rekomendasi	1.000
Ukuran Daerah	1.000

Sumber: Output PLS 3.0, data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.5 diketahui nilai konstruk atau variabel laten temuan audit, belanja daerah, karakteristik pemerintah daerah, tindak lanjut rekomendasi, dan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah > 0.70, ini menunjukkan bahwa semua variabel laten eksogen dan endogen telah reliabel dan memenuhi syarat pengujian.

4.2.3.3. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan dilakukan untuk mengetahui bahwa korelasi antara variabel dengan variabel laten itu sendiri memiliki diskriminan (perbedaan) dengan variabel laten lainnya. Berikut adalah hasil uji validitas diskriminan menggunakan *Fornell-Lackers Criterion* pada tabel 4.6:

Tabel 4.7 Uji *Fornell-Lackers Criterion*

	belanja daerah	karakteristik pemda	kinerja keuangan pemda	temuan audit	tindak lanjut rekomendasi
Belanja Daerah	1.000				
Rasio Eefektivitas	-0.088	1.000			
Temuan Audit	0.336	-0.012	1.000		
Tindak Lanjut Rekomendasi	-0.023	0.069	-0.047	1.000	
Ukuran Daerah	0.044	0.094	-0.026	0.620	1.000

Sumber: Output PLS 3.0, data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.6 diketahui nilai korelasi antara variabel dengan variabel laten lebih besar dibandingkan dengan nilai dengan variabel laten lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa konstruk atau variabel laten temuan audit, belanja daerah, karakteristik pemerintah daerah, tindak lanjut rekomendasi, dan kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki tingkat validitas diskriminan yang baik dan telah memenuhi syarat valid pengujian.

4.2.2. Model Struktural

R-Squares (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa besar variabel laten eksogen (bebas) dapat menjelaskan variabel laten endogen (terikat). Berikut adalah hasil uji R-Squares (R^2) pada tabel 4.7:

Tabel 4.8 Uji R-Squares (R^2)

	R Square
kinerja keuangan pemda	0.115
tindak lanjut rekomendasi	0.391

Sumber: Output PLS 3.0,data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.7 diketahui variabel temuan audit, belanja daerah, karakteristik pemerintah daerah mampu menjelaskan variabel tindak lanjut rekomendasi sebesar 0.391 atau sebesar 39.1% dan sebesar 60.9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian yang dilakukan. Variabel temuan audit, belanja daerah, karakteristik pemerintah daerah, dan tindak lanjut rekomendasi mampu menjelaskan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0.115 atau 11.5% dan sebesar 88.5% sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian yang dilakukan.

4.2.3. Uji Hipotesis

Pada penelitian ini dilakukan 2 (dua) jenis uji hipotesis, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Uji hipotesis pengaruh langsung dilakukan dengan menggunakan metode *bootstrapping path coefficients* dan uji hipotesis tidak langsung dilakukan menggunakan *bootstrapping specific indirect effect* dengan melihat pada nilai nilai *p-value* 0.05, apabila nilai sig. < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sebaliknya apabila nilai sig. > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berikut adalah hasil uji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung pada tabel 4.8 dan 4.9:

Tabel 4.9 Uji Pengaruh Langsung

	P Values

belanja daerah -> kinerja keuangan pemda	0.007
belanja daerah -> tindak lanjut rekomendasi	0.441
karakteristik pemda -> kinerja keuangan pemda	0.780
karakteristik pemda -> tindak lanjut rekomendasi	0.542
temuan audit -> kinerja keuangan pemda	0.829
temuan audit -> tindak lanjut rekomendasi	0.000
tindak lanjut rekomendasi -> kinerja keuangan pemda	0.785

Sumber: Output PLS 3.0,data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji pengaruh langsung pada tabel 4.8 dapat diketahui temuan audit memiliki nilai *p-value* sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 (*sig* < 0.05) ini menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi dan H_1 pada penelitian diterima.

Belanja daerah memiliki nilai *p-value* sebesar 0.441 lebih besar dari 0.05 (*sig* > 0.05) ini menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi dan H_1 pada penelitian ditolak.

Karakteristik pemerintah daerah memiliki nilai *p-value* sebesar 0.542 lebih besar dari 0.05 (*sig* > 0.05) ini menujukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi dan H_1 pada penelitian ditolak.

Temuan audit memiliki nilai *p-value* sebesar 0.829 lebih besar dari 0.05 (*sig* > 0.05) ini menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan H_1 pada penelitian ditolak.

Belanja daerah memiliki nilai *p-value* sebesar 0.007 lebih kecil dari 0.05 (*sig* < 0.05) ini menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan H_1 pada penelitian diterima.

Karakteristik pemerintah daerah memiliki nilai *p-value* sebesar 0.780 lebih besar dari 0.05 (*sig* > 0.05) ini menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan H_1 pada penelitian ditolak.

Tindak lanjut rekomendasi memiliki nilai *p-value* sebesar 0.785 lebih besar dari 0.05 (*sig* > 0.05) ini menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan H_1 pada penelitian ditolak.

Tabel 4.10 Uji Pengaruh Tidak Langsung

	P Values
belanja daerah -> tindak lanjut rekomendasi -> kinerja keuangan pemda	0.860
karakteristik pemda -> tindak lanjut rekomendasi -> kinerja keuangan pemda	0.895
temuan audit -> tindak lanjut rekomendasi -> kinerja keuangan pemda	0.834

Sumber: Output PLS 3.0,data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui pengaruh temuan audit terhadap kinerja keuangan pemda melalui tindak lanjut rekomendasi memiliki nilai *p-value* sebesar 0.0839 lebih besar dari 0.05 (*sig* > 0.05) ini menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui tindak lanjut rekomendasi dan H_1 pada penelitian ditolak.

Belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemda melalui tindak lanjut rekomendasi memiliki nilai *p-value* sebesar 0.860 lebih besar dari 0.05 (*sig* > 0.05) ini menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui tindak lanjut rekomendasi dan H_1 pada penelitian ditolak.

Karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemda melalui tindak lanjut rekomendasi memiliki nilai *p-value* sebesar 0.895 lebih besar dari 0.05 (*sig* > 0.05) ini menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui tindak lanjut rekomendasi.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi

Berdasarkan tabel 4.8 pengaruh temuan audit terhadap tindak lanjut rekomendasi memiliki nilai *p-value* sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 (*sig* < 0.05) ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan semakin tinggi temuan audit pada laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkatkan jumlah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga tidak terjadi temuan secara berulang pada tahun selanjutnya. Banyaknya jumlah tindak lanjut rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi kredibilitas serta transparansi atas pelaporan keuangan yang dilakukan.

4.3.2. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi

Berdasarkan tabel 4.8 pengaruh belanja daerah terhadap tindak lanjut rekomendasi memiliki nilai *p-value* sebesar 0.425 lebih besar dari 0.05 (*sig* > 0.05) ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

Semakin tinggi belanja daerah yang dilakukan maka akan semakin tinggi tindak lanjut rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi, hal ini menunjukkan bahwa baik tidaknya belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat merepresentasikan jumlah tindak lanjut rekomendasi yang perlu dilakukan. Ini dapat terjadi ketika pemerintah daerah melakukan pengawasan atas penggunaan anggaran belanja dengan baik sehingga mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecuragan yang diakibatkan ketidakselarasan antara belanja daerah yang dianggarkan dengan realisasinya terjadi.

4.3.3. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi

Berdasarkan tabel 4.8 pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tindak lanjut rekomendasi memiliki nilai *p-value* sebesar 0.517 lebih besar dari 0.05 (*sig* > 0.05) ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

Teori yang digunakan dalam penelitian menyatakan bahwa semakin bayak aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka akan semakin tinggi tindak lanjut rekomendasi yang perlu dilakukan. Namun hasil pengujian menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi. Tidak berpengaruhnya karakteristik pemerintah daerah, ukuran daerah, terhadap tindak lanjut rekomendasi menunjukkan bahwa banyak sedikitnya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak dapat mereprensentasikan jumlah tindak lanjut rekomendasi

yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat disebabkan karena baiknya pengawasan serta pengelolaan aset yang dimiliki. Salah satu penyebab diberikannya rekomendasi atas temuan audit aset merupakan akibat dari kurang dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya aset yang dimiliki pemerintah daerah tersebut.

4.3.4. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel 4.8 pengaruh temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai *p-value* sebesar 0.830 lebih besar dari 0.05 (*sig* > 0.05) ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hatimah (2018) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dan berbanding terbalik dengan penelitian Hakim & Nurhenti (2020) yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Temuan audit adalah temuan-temuan masalah penting (material) selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang bersangkutan karena memiliki dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) entitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak temuan audit maka akan semakin rendah/buruk kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah temuan audit tidaklah mempengaruhi baik atau tidaknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dikarenakan tindak lanjut rekomendasi

terhadap temuan audit oleh pemerintah daerah telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

4.3.5. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel 4.8 pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan memiliki nilai *p-value* sebesar 0.015 lebih kecil dari 0.05 (*sig* < 0.05) ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Halmawati (2021) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan berbanding terbalik dengan hasil peneltian Defitri et al. (2021) yang menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Semakin banyak pemerintah daerah melakukan pembelanjaan daerah untuk meningktakan infrastruktur serta pelayanan bagi masyarakat, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin baik. Baik tidaknya kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari seberapa baik belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan belanja modal untuk meningkatkan fasilitas pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan baik. Semakin baik pertumbuhan infrastruktur daerah dan penyediaan fasilitas publik bagi

masyarakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

4.3.6. Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel 4.8 pengaruh tindak lanjut rekomendasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah nilai *p-value* sebesar 0.767 lebih besar dari 0.05 (*sig* > 0.05) ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Tjandrakirana et al. (2019) dan Kurnia (2020) yang menunjukkan tindak lanjut rekomendasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Rekomendasi merupakan saran yang diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditujukan kepada entitas yang bersangkutan untuk melakukan tindakan perbaikan karena akan berdampak pada entitas tersebut. Tindak lanjut rekomendasi merupakan jawaban atau penjelasan atas pelaksaan rekomendasi. Baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat berdasarkan jumlah selisih antara jumlah rekomendasi yang diberikan dengan jumlah tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak sedikitnya selisih antara jumlah rekomendasi dengan tindak lanjut sesuai rekomendasi tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dikarenakan pemerintah daerah telah melakukan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, sehingga nilai selisih antara jumlah rekomendasi dengan tindak lanjut yang perlu dilakukan menurun.

4.3.7. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel 4.8 pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai *p-value* sebesar 0.775 lebih besar dari 0.05 (*sig* > 0.05) ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim & Nurhenti (2020) yang menunjukkan bahwa variabel karakteristik pemerintah daerah, ukuran daerah, tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia dan berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simarmata (2019) menunjukkan bahwa variabel karakteristik pemerintah daerah, ukuran daerah, berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Karakteristik pemerintah daerah, ukuran daerah, digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu pemerintah daerah. Semakin besar ukuran suatu daerah maka total aset yang dimiliki akan semakin besat pula, hal ini dapat menunjang kegiatan operasional pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan daerah. Namun hasil pengujian menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah, ukuran daerah, tidak mempengaruhi baik atau tidaknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dikarenakan tidak maksimalnya fungsi aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan melalui peningkatakan pendapatan daerah, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi daerah yang

akan digunakan kembali sebagai anggaran belanja untuk pembangunan ekonomi.

4.3.8. Pengaruh Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Tindak Lanjut Rekomendasi Sebagai Variabel Mediasi (*Intervening*)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa pengaruh tidak langsung temuan audit terhadap kinerja keuangan pemda melalui tindak lanjut rekomendasi memiliki nilai *p-value* sebesar 0.821 lebih besar dari 0.05 (*sig* > 0.05) ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi tidak dapat memediasi pengaruh temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan baik. Ini disebabkan oleh besarnya selisih jumlah rekomendasi yang diberikan dengan tindak lanjut yang dilakukan sesuai rekomendasi. Kurangnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi menimbulkan rekomendasi berulang pada Laporan Hasil Pemeriksaan tahun selanjutnya dan akan berdampak pada baik/buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.3.9. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Tindak Lanjut Rekomendasi Sebagai Variabel Mediasi (*Intervening*)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa pengaruh tidak langsung belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemda melalui tindak

lanjut rekomendasi memiliki nilai *p-value* sebesar 0.853 lebih besar dari 0.05 (*sig* > 0.05) ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hasil penlitian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi tidak dapat memediasi pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan daerah akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Namun, berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi tidak dapat mendorong pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat disebabkan karena selisih jumlah rekomendasi atas belanja yang diberikan lebih besar daripada jumlah tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi.

4.3.10. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Tindak Lanjut Rekomendasi Sebagai Variabel Mediasi (*Intervening*)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa pengaruh tidak langsung karakteristik pemda, ukuran daerah, terhadap kinerja keuangan pemda melalui tindak lanjut rekomendasi memiliki nilai *p-value* sebesar 0.865 lebih besar dari 0.05 (*sig* > 0.05) ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

Semakin besar ukuran suatu daerah akan memudahkan kinerja operasional sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu apabila ukuran daerah, yang diproksikan dengan total aset, dikelola dengan baik akan meningkatkan ekonomi daerah dan akan meningkatkan pendapatan daerah. Banyak sedikitnya tindak lanjut yang

dilakukan sesuai dengan rekomendasi menentukan baik/tidaknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi tidak dapat mendorong kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Banyak sedikitnya jumlah tindak lanjut yang belum/tidak sesuai dilakukan daripada jumlah rekomendasi yang diterima dapat mempengaruhi baik/tidaknya kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian analisis jalur atau *path analysis* yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Temuan audit laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi, hal ini dikarenakan tinggi rendahnya jumlah rekomendasi yang diberikan dipengaruhi oleh jumlah temuan audit semakin tinggi temuan audit akan meningkatkan jumlah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah.
2. Belanja daerah, tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi. Keselarasan antara belanja daerah yang dianggarkan dengan realisasinya karena pemerintah daerah melakukan pengawasan dengan baik dan sesuainya tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap rekomendasi yang diberikan.
3. Karakteristik pemerintah daerah, yang diproksikan dengan total aset, tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi. Baiknya pengawasan serta pengelolaan aset yang dimiliki dan sesuainya tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah atas rekomendasi terhadap temuan audit aset yang diberikan.
4. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan tindak lanjut rekomendasi

yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap temuan audit telah dilakukan sesuai dengan yang diberikan.

5. Belanja daerah berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Baik tidaknya kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari seberapa baik pemerintah daerah melakukan belanja modal untuk meningkatkan infrastruktur daerah, semakin baik pertumbuhan infrastruktur daerah dan penyediaan fasilitas publik bagi masyarakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan meningkatnya pendapan perkapita daerah.
6. Tindak lanjut rekomendasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini dapat dikarenakan pemerintah daerah telah melakukan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, sehingga nilai selisih antara jumlah rekomendasi dengan tindak lanjut yang perlu dilakukan menurun.
7. Karakteristik pemerintah daerah, yang diproksikan dengan total aset, tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini dapat dikarenakan tidak maksimalnya fungsi aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan melalui peningkatakan pendapatan daerah, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
8. Temuan audit, belanja daerah, dan karakteristik pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui tindak lanjut rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa

banyak jumlah tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang diterima tidak cukup untuk mendorong kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi semakin baik.

5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran

Beberapa keterbatasan dalam penelitian, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel berulang dari peneltian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, yaitu temuan audit, karakteristik pemerintah daerah, dan belanja daerah.
2. Penelitian ini menggunakan hanya 1 (satu) periode tahun anggaran yaitu 2021, sehingga menyebabkan keterbatasan jumlah sampel untuk menentukan seberapa baik kinerja keuangan pemerintah daerah dalam jangka panjang.
3. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian terbatas pada Kabupaten/Kota se-Jawa, sehingga masing kurang bisa mewakili seberapa baik kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dibuat dan untuk membantu pengembangan studi dengan topik yang sama atau relevan, berikut merupakan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi pada variabel peneltian lebih dari satu sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi lebih baik dan luas. Misalnya, untuk mengukur variabel karakteristik pemerintah daerah dapat menggunakan

proksi kekayaan daerah dan/atau tingkat ketergantungan pemerintah daerah.

2. Menggunakan variabel independen lain yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah selain variabel yang telah digunakan dalam penelitian. Misalnya variabel Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan.
3. Laporan keuangan yang menjadi sampel dalam peneltiian tidak hanya terbatas pada LKPD se-Jawa saja.
4. Jangka waktu yang digunakan bisa lebih diperpanjang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, A., Septiyanti, R., & Metalia, M. (2017). engaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, dan Hasil Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *22*(1), 1–14.

Andani, M., Sarwani, S., & Respati, N. W. (2019). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit terhadap kinerja pemerintah provinsi di indonesia. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi&Bisnis Universitas Bengkulu*, *9*(1). https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130

Ayunisa, N. (2022). The Effect of Local Government Characteristics And Audit Findings on Financial Performance With Responsibility Level Moderation. In *Journal of Economics, Finance And Management Studies* (Vol. 5, Issue 5). Everant Journals. https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i5-16

Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* (3rd ed.). Erlangga.

Defitri, S. Y., Fetrisia, S., & Maison, W. (2021). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Ekonomia*. https://www.ejournal.lembahdempo.ac.id/index.php/ITBis-E/article/view/126

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling. In *Long Range Planning* (3rd ed.). Sage Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7002

Hakim, L., & Nurhenti, E. (2020). Determinants of the Performance of Provincial Governments in Indonesia. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, *10*(2), 171–178. https://doi.org/10.30741/wiga.v10i2.600

Hatimah, K. (2018). *PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU*.

Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*. https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/4120

Kurnia, D. (2020). Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Revenue: Jurnal Akun*, *01*(01), 112–124. http://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/11

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* . Andi.

Muflihatin, A. (2016). *Pengaruh Opini Audit, Fungsi Pengawasan DPRD, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH .

Novianti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, *5*(1), 1–10.

Noviyanti, N. A., & Kiswanto, K. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/9759

Purba, C. B. (2017). OPINI DAN STATUS TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN BARAT, TENGAH, DAN TIMUR. *Jurnal Akuntansi*, *18*(3). https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.272

Puspita, W. D., & Pangastuti, D. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Among Makarti*, *15*(1), 90–104. https://doi.org/10.52353/ama.v15i1.246

Raharjo, E. (2007). TEORI AGENSI DAN TEORI STEWARSHIP DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI. *Fokus Ekonomi*, *2*(1), 37–46.

Rahmayanti, D. (2018). *DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA*. Universitas Islam Indonesia.

Rahmi, M., & Ariani, N. E. (2021). PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PRIVINSI ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *5*(4), 497–505. https://doi.org/10.24815/JIMEKA.V5I4.15851

Rai, I. G. A. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik: konsep, praktik, studi kasus*. Salemba Empat.

Rosadi, S., & Okfitasari, A. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan terhadap Opini Audit BPK. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *19*(2). https://doi.org/10.29040/jap.v19i2.326

Saffanah, I. S. (2022). *PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Jawa Barat Tahun 2015-2019)*. Universitas Pasundan.

Salsabila, R., & Wahyudi, I. (2022). PENGARUH TEMUAN AUDIT, REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN, DAN UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP OPINI AUDIT PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, *4*(1), 38–45. https://doi.org/https://doi.org/10.54783/jin.v4i1.515

Saputri, S. H., & Kurnia. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *9*(1). http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2760/2770

Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera …. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *3*(1). http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/356

Satria, D. I., & Sari, H. P. (2018). Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). *AT-TASYRI'*,

X(1), 9–21.
Simarmata, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Utara. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas …*. https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/3300
Simartama, S. (2019). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Povinsi Sumatera Utara*. Pembangunan Panca Budi.
Soeratmoko, N. (2018). *PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN KEPERCAYAAN (TRUST) PELANGGAN RUMAH TANGGA DAYA 900 VA PLN DI SURABAYA*. Universitas Ciputra.
Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA. CV.
Tarihoran, S. N. (2019). *Pengaruh Temuan Audit BPK, Opini Audit BPK, Ukuran Pemerintahan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2016*. repositori.usu.ac.id. http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/13514
Tjandrakirana, R., Ermadiani, E., Rohman, A., & Widad, A. (2019a). Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Ketidakpatuhan Pada Peraturan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan Tindak Lanjut Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. In *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan* (Vol. 12). Universitas Mercu Buana. https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.02.002
Tjandrakirana, R., Ermadiani, E., Rohman, A., & Widad, A. (2019b). Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Ketidakpatuhan Pada Peraturan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Dan Tindak Lanjut Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. *Jurnal Profita*, *12*(2), 186. https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.02.002

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Sampel Jumlah Temuan Audit, Belanja Daerah, dan Ukuran Daerah

Dalam Miliar Rupiah

Nomor	Kabupaten/Kota di Jawa	Jumlah Temuan Audit	Belanja Daerah	Ukuran Daerah
1	Kabupaten Lebak	7	0.13	47
2	Kabupaten Pandeglang	9	0.16	33
3	Kabupaten Serang	7	0.15	44
4	Kabupaten Tangerang	8	0.24	18
5	Kota Cilegon	4	0.12	51
6	Kota Serang	11	0.18	34
7	Kota Tangerang	9	0.13	16
8	Kota Tangsel	7	0.23	24
9	Kabupaten Bantul	13	0.14	37
10	Kabupaten Gunung kidul	11	0.12	33
11	Kabupaten Kulon Progo	13	0.13	25
12	Kabupaten Sleman	10	0.16	59
13	Kota Yogya	4	0.14	47
14	Kabupaten Bandung	26	0.15	12
15	Kabupaten Bandung Barat	21	0.12	40
16	Kabupaten Bekasi	12	0.12	14
17	Kabupaten Ciamis	16	0.15	40
18	Kabupaten Cianjur	18	0.12	67
19	Kabupaten Cirebon	14	0.11	49
20	Kabupaten Indramayu	15	0.09	61
21	Kabupaten Karawang	21	0.2	63
22	Kabupaten Kuningan	22	0.12	29
23	Kabupaten Majalengka	22	0.19	55
24	Kabupaten Pangandaran	36	0.31	25
25	Kabupaten Subang	18	0.14	48
26	Kabupaten Sukabumi	20	0.15	53
27	Kabupaten Tasikmalaya	34	0.08	48
28	Kota Bandung	17	0.13	44
29	Kota Banjar	13	0.09	16
30	Kota Bogor	29	0.16	100
31	Kota Cimahi	19	0.17	30
32	Kota Cirebon	16	0.08	40
33	Kota Sukabumi	15	0.11	18
34	Kota Tasik	12	0.19	39
35	Kabupaten Banjarnegara	4	0.14	47
36	Kabupaten Banyumas	12	0.15	73
37	Kabupaten Batang	13	0.14	30
38	Kabupaten Blora	10	0.14	35
39	Kabupaten Boyolali	13	0.24	47
40	Kabupaten Brebes	16	0.14	39

Lampiran 1 (lanjutan)

Daftar Sampel Jumlah Temuan Audit, Rasio Belanja Daerah, dan Ukuran Daerah

Dalam Miliar Rupiah

Nomor	Kabupaten/Kota di Jawa	Jumlah Temuan Audit	Belanja Daerah	Ukuran Daerah
41	Kabupaten Cilacap	14	0.18	63
42	Kabupaten Demak	3	0.15	60
43	Kabupaten Grobogan	19	0.12	41
44	Kabupaten Jepara	9	0.1	67
45	Kabupaten Karanganyar	9	0.11	49
46	Kabupaten Kebumen	12	0.1	47
47	Kabupaten Kendal	11	0.07	37
48	Kabupaten Klaten	11	0.1	35
49	Kabupaten Kudus	13	0.1	49
50	Kabupaten Magelang	22	0.14	36
51	Kabupaten Pati	17	0.14	63
52	Kabupaten Pekalongan	5	0.1	31
53	Kabupaten Pemalang	32	0.09	39
54	Kabupaten Purbalingga	35	0.12	29
55	Kabupaten Purworejo	5	0.12	33
56	Kabupaten Rembang	7	0.1	23
57	Kabupaten Semarang	8	0.16	53
58	Kabupaten Sragen	29	0.1	42
59	Kabupaten Sukoharjo	22	0.16	63
60	Kabupaten Tegal	12	0.16	39
61	Kabupaten Temanggung	15	0.13	34
62	Kabupaten Wonogiri	5	0.19	40
63	Kabupaten Wonosobo	10	0.17	38
64	Kota Magelang	18	0.2	43
65	Kota Pekalongan	4	0.17	30
66	Kota Salatiga	13	0.14	32
67	Kota Semarang	36	0.2	21
68	Kota Surakarta	6	0.18	13
69	Kota Tegal	7	0.13	24
70	Kabupaten Bangkalan	11	0.13	33
71	Kabupaten Banyuwangi	13	0.25	49
72	Kabupaten Blitar	15	0.18	48
73	Kabupaten Bojonegoro	13	0.32	15
74	Kabupaten Bondowoso	19	0.12	29
75	Kabupaten Gresik	19	0.09	62
76	Kabupaten Jombang	9	0.16	42
77	Kabupaten Kediri	11	0.11	53
78	Kabupaten Lamongan	22	0.14	57
79	Kabupaten Lumajang	14	0.12	28
80	Kabupaten Madiun	14	0.1	47

Lampiran 1 (lanjutan)

Daftar Sampel Jumlah Temuan Audit, Rasio Belanja Daerah, dan Ukuran Daerah

Dalam Miliar Rupiah

Nomor	Kabupaten/Kota di Jawa	Jumlah Temuan Audit	Belanja Daerah	Ukuran Daerah
81	Kabupaten Magetan	36	0.09	25
82	Kabupaten Malang	23	0.11	62
83	Kabupaten Mojokerto	9	0.12	62
84	Kabupaten Nganjuk	8	0.18	39
85	Kabupaten Ngawi	13	0.12	42
86	Kabupaten Pacitan	10	0.13	22
87	Kabupaten Pamekasan	14	0.19	38
88	Kabupaten Pasuruan	9	0.14	43
89	Kabupaten Ponorogo	12	0.11	26
90	Kabupaten Probolinggo	15	0.08	31
91	Kabupaten Sampang	18	0.17	41
92	Kabupaten Sidoarjo	13	0.22	22
93	Kabupaten Situbondo	18	0.15	45
94	Kabupaten Trenggalek	11	0.13	27
95	Kabupaten Tuban	29	0.16	77
96	Kabupaten Tulungagung	11	0.12	45
97	Kota Batu	22	0.15	20
98	Kota Blitar	5	0.13	29
99	Kota Kediri	8	0.08	33
100	Kota Madiun	9	0.18	29
101	Kota Malang	14	0.13	82
102	Kota Mojokerto	11	0.17	20
103	Kota Pasuruan	14	0.11	32
104	Kota Probolinggo	36	0.08	19
105	Kota Surabaya	10	0.13	48

Lampiran 2

Daftar Sampel Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi dan Rasio Efektivitas

Nomor	Kabupaten/Kota di Jawa	Tindak Lanjut Rekomendasi	Rasio Efektivitas
1	Kabupaten Lebak	4	1
2	Kabupaten Pandeglang	9	0.97
3	Kabupaten Serang	1	0.94
4	Kabupaten Tangerang	6	1.07
5	Kota Cilegon	3	0.96
6	Kota Serang	7	1.01
7	Kota Tangerang	5	1.01
8	Kota Tangsel	0	1.05
9	Kabupaten Bantul	5	1.03
10	Kabupaten Gunung kidul	8	1
11	Kabupaten Kulon Progo	22	1.04
12	Kabupaten Sleman	14	1.04
13	Kota Yogya	0	1.05
14	Kabupaten Bandung	51	1.01
15	Kabupaten Bandung Barat	43	0.94
16	Kabupaten Bekasi	23	1
17	Kabupaten Ciamis	10	0.86
18	Kabupaten Cianjur	24	1.01
19	Kabupaten Cirebon	19	1.02
20	Kabupaten Indramayu	18	0.98
21	Kabupaten Karawang	206	1.04
22	Kabupaten Kuningan	48	0.98
23	Kabupaten Majalengka	40	0.98
24	Kabupaten Pangandaran	49	1.09
25	Kabupaten Subang	21	0.98
26	Kabupaten Sukabumi	30	1
27	Kabupaten Tasikmalaya	70	0.99
28	Kota Bandung	18	0.96
29	Kota Banjar	15	1.01
30	Kota Bogor	37	1.07
31	Kota Cimahi	18	0.96
32	Kota Cirebon	20	0.84
33	Kota Sukabumi	18	1.05
34	Kota Tasik	22	0.99
35	Kabupaten Banjarnegara	2	0.98
36	Kabupaten Banyumas	30	1.02
37	Kabupaten Batang	13	1.03
38	Kabupaten Blora	5	1.04
39	Kabupaten Boyolali	12	2.08
40	Kabupaten Brebes	12	1.01

Lampiran 2 (lanjutan)

Daftar Sampel Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi dan Rasio Efektivitas

Nomor	Kabupaten/Kota di Jawa	Tindak Lanjut Rekomendasi	Rasio Efektivitas
36	Kabupaten Banyumas	15	1.02
37	Kabupaten Batang	0	1.03
38	Kabupaten Blora	24	1.04
39	Kabupaten Boyolali	11	2.08
40	Kabupaten Brebes	7	1.01
41	Kabupaten Cilacap	12	1.03
42	Kabupaten Demak	7	1.03
43	Kabupaten Grobogan	4	1.03
44	Kabupaten Jepara	13	1.02
45	Kabupaten Karanganyar	33	1.01
46	Kabupaten Kebumen	3	1.03
47	Kabupaten Kendal	2	1.02
48	Kabupaten Klaten	69	1.01
49	Kabupaten Kudus	93	1.09
50	Kabupaten Magelang	2	1
51	Kabupaten Pati	9	1.01
52	Kabupaten Pekalongan	12	1
53	Kabupaten Pemalang	63	1.02
54	Kabupaten Purbalingga	35	1.04
55	Kabupaten Purworejo	31	1.06
56	Kabupaten Rembang	12	1.03
57	Kabupaten Semarang	0	1.08
58	Kabupaten Sragen	5	1.09
59	Kabupaten Sukoharjo	38	1.05
60	Kabupaten Tegal	2	1.04
61	Kabupaten Temanggung	8	1.05
62	Kabupaten Wonogiri	73	1.01
63	Kabupaten Wonosobo	0	1.04
64	Kota Magelang	6	1.11
65	Kota Pekalongan	12	1.04
66	Kota Salatiga	1.38	1.03
67	Kota Semarang	5.06	0.94
68	Kota Surakarta	1	1
69	Kota Tegal	1.46	0.98
70	Kabupaten Bangkalan	1.86	1.04

Lampiran 2 (lanjutan)

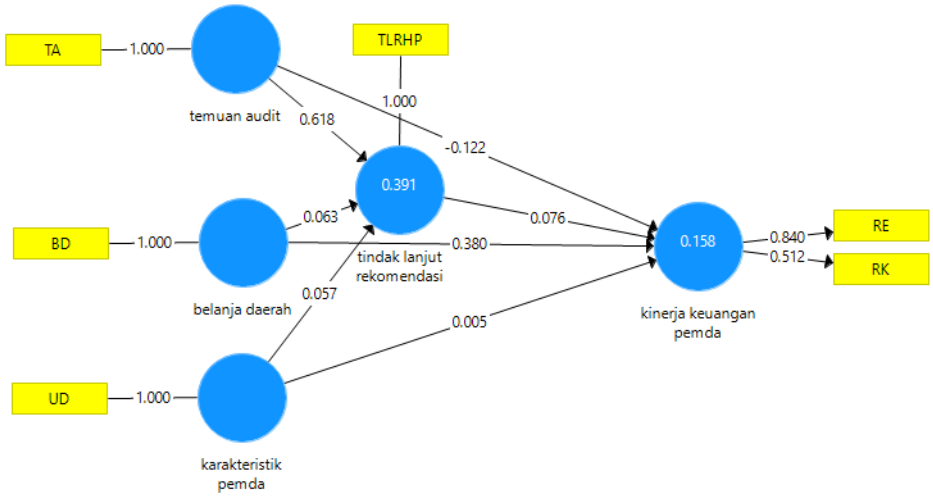
Daftar Sampel Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi dan Rasio Efektivitas

Nomor	Kabupaten/Kota di Jawa	Tindak Lanjut Rekomendasi	Rasio Efektivitas
71	Kabupaten Banyuwangi	10	1.06
72	Kabupaten Blitar	16	1.06
73	Kabupaten Bojonegoro	20	1.37
74	Kabupaten Bondowoso	-107	1.03
75	Kabupaten Gresik	37	0.95
76	Kabupaten Jombang	19	1.11
77	Kabupaten Kediri	9	1.06
78	Kabupaten Lamongan	45	1
79	Kabupaten Lumajang	23	1.04
80	Kabupaten Madiun	31	1.05
81	Kabupaten Magetan	58	1.06
82	Kabupaten Malang	20	1.03
83	Kabupaten Mojokerto	10	1.08
84	Kabupaten Nganjuk	3	1.07
85	Kabupaten Ngawi	26	1.02
86	Kabupaten Pacitan	10	1.05
87	Kabupaten Pamekasan	21	0.97
88	Kabupaten Pasuruan	10	1.05
89	Kabupaten Ponorogo	26	1.06
90	Kabupaten Probolinggo	4	1.02
91	Kabupaten Sampang	28	1.04
92	Kabupaten Sidoarjo	23	1.09
93	Kabupaten Situbondo	31	1.05
94	Kabupaten Trenggalek	12	1.02
95	Kabupaten Tuban	40	1.13
96	Kabupaten Tulungagung	19	1.18
97	Kota Batu	55	1.08
98	Kota Blitar	1	1.2
99	Kota Kediri	1	1.18
100	Kota Madiun	6	1.09
101	Kota Malang	13	1.07
102	Kota Mojokerto	11	1.1
103	Kota Pasuruan	26	1.15
104	Kota Probolinggo	97	1.06
105	Kota Surabaya	18	0.96

Lampiran 3

Hasil Uji Model SEM-PLS 3.0

Sebelum dihapus



Setelah dihapus

